

POLICY BRIEF

Local Champion Empowerment Program in Non-state Owned Forest area
(Area Penggunaan Lain-APL) in Kutai Timur District, East Kalimantan
Province and Kotawaringin Barat District, Central Kalimantan Province
KLHK-UNDP-GEF Project

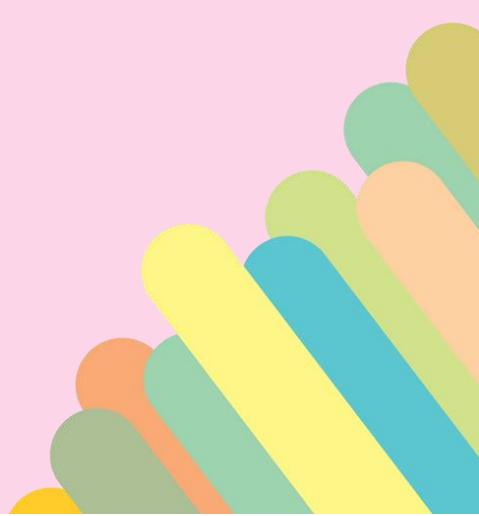
“Strengthening Forest Areas Planning and Management in Kalimantan”

**Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten
Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah**

Disusun oleh :

**Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro
(ASPPUK)**

2022



Ringkasan

Pencapaian pembangunan ekonomi suatu daerah sangat tergantung dari pembangunan manusianya. Salah satu alat ukurnya adalah tingkat indeks pemberdayaan gender. Provinsi Kalimantan Tengah menduduki rangking pertama secara nasional dinilai dari indeks pemberdayaan gender (IDG). Walaupun secara total nilai IDG Provinsi Kalimantan Tengah telah mencapai 82,41%, namun Kabupaten Kotawaringin Barat masih menduduki peringkat ke 13 dari 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah, terendah setelah Kabupaten Seruyan, yaitu 64,54%. Pembangunan manusia dalam hal ini indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Kotawaringin Barat, masih jauh dari harapan. Artinya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi, masih rendah.

Keberhasilan pembangunan dan pengembangan sumberdaya ekonomi lokal di desa sangat bergantung pada sejauh mana keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki terus didorong secara maksimal. Dalam meningkatkan partisipasi laki-laki dan perempuan, keterbukaan akses yang setara dan kontrol yang seimbang menjadi prasyarat, sehingga manfaat dapat diperoleh secara adil dan merata. Untuk tujuan tersebut, urgensi kesetaraan gender di dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi semakin nyata, dibutuhkan. Untuk itu, pengelolaan sumber-sumber ekonomi desa mesti dibarengi pula dengan perbaikan pembangunan kesehatan ibu dan anak, pendidikan serta kondisi sosial kelompok perempuan dan anak khususnya, serta masyarakat umumnya. Dimana diharapkan tujuan dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dapat memberikan kesejahteraan dan terjadi perbaikan serta peningkatan pendapatan keluarga serta perbaikan posisi dan kondisi kepemimpinan perempuan di akar rumput, terutama didalam pengelolaan ekonomi lokal.

Salah satu lokasi sasaran proyek Kalimantan Forest (Kalfor) UNDP kerjasama Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK) adalah Kelurahan Kotawaringin Hilir yang berada di Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kota Waringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Jarak tempuh dari Kotawaringin Hilir ke Ibukota Kabupaten 50 km dengan menggunakan sepeda motor selama kurang lebih 1,30 menit. Jarak dari Kelurahan ke Ibukotakkecamatan 7 Km. Jumlah kepala keluarga 899 KK dengan rincian : Laki-Laki 1604 jiwa, perempuan 1544 jiwa. Total jumlah penduduk 3.148 jiwa. Tingkat kesejahteraan masyarakatnya berada pada level sedang, tingkat kemiskinan berada pada posisi $\leq 7\%$ dan tingkat pengangguran sebesar $\leq 3\%$.

Rata-rata masyarakat di Kelurahan Kotawaringin Hilir memiliki kebun kelapa sawit yang dikelola sendiri dan kebun plasma yang dikelola oleh koperasi perusahaan. Pengangguran bisa dikatakan tidak ada karena masyarakat memanfaatkan musim untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan. Contohnya : Musim buah-buahan, masyarakat menjual hasil buah-buahan. Saat musim banjir nelayan mengalihkan aktivitasnya ke kebun kelapa sawit, mengambil nira dan mengolahnya menjadi gula aren atau menjadi tukang dll. Saat musim kemarau tiba, masyarakat mencari ikan.

Dukungan para pemangku kepentingan untuk memberdayakan para Local Champion dan kelompok perempuan, kaum muda serta kelompok marjinal lainnya sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, perlu suatu upaya sinergitas dan kolaborasi yang berkelanjutan dalam bentuk komitmen program, kegiatan dan anggaran untuk pengembangan ekonomi lokal yang berorientasi pada pembangunan lingkungan yang berkelanjutan serta berperspektif gender.



Pendahuluan

Salah satu hambatan dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah ketidaksetaraan gender dan sosial yang menyebabkan munculnya eksklusi sosial dan gender. Manfaat dari program-program pembangunan, khususnya program pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan belum dapat dinikmati secara adil dan setara, khususnya oleh perempuan dan kelompok marjinal lainnya. Oleh karenanya, upaya inklusi gender menjadi sangat penting untuk memastikan kesuksesan suatu program.

Dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan nasional, pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional, mendorong pengintegrasian perspektif gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan.

Pengarusutamaan Gender adalah strategi pembangunan pemberdayaan perempuan, implementasinya melalui prinsip kesetaraan dan keadilan gender agar menjadi dasar dalam setiap kebijakan dalam pembangunan. Pengarusutamaan Gender (PUG) bukanlah suatu program atau kegiatan melainkan suatu strategi pembangunan untuk mencapai suatu keadilan dan kesetaraan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkomitmen untuk mendukung percepatan pengarusutamaan gender dalam upaya meningkatkan pembangunan lingkungan hidup dengan mengeluarkan Peraturan Menteri LHK Nomor : P.31/MenLHK/Setjen/Set.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk mendukung percepatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, maka diperlukan upaya semua pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di setiap level pembangunan mulai dari tingkatkelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi dan nasional.

Melalui pendanaan dari Global Environmental Facility (GEF), Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) bekerjasama dengan United Nations Development Program (UNDP) melaksanakan Proyek Penguatan Perencanaan dan Pengelolaan Hutan di Luar Kawasan di Kalimantan (Strengthening Forest Area Planning and Management in Kalimantan) atau KalFor Project, dimana salah satu lokasi yang menjadi target adalah Kelurahan Kotawaringin Hilir Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK) merupakan salah satu mitra penerima hibah proyek berjudul Local Champion Empowerment Program in Non-state Owned Forest area (Area Penggunaan Lain-APL) in Kutai Timur District, East Kalimantan Province and Kotawaringin Barat District, Central Kalimantan Province, yang memiliki tujuan untuk menciptakan para local champion khususnya kader-kader perempuan yang memiliki jiwa kepemimpinan responsive gender, inovatif, kreatif dan transformative di tingkat desa melalui pengelolaan sumber daya ekonomi alternatif untuk keberlanjutan hidup.

Melalui Proyek ini diharapkan para Local Champion atau kader-kader penggerak perubahan sosial ekonomi di tingkat kelurahan/desa aktif memimpin keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan sumber-sumber ekonomi desa secara berkelanjutan dan turut mendukung tujuan besar proyek untuk membangun penguatan perencanaan pengelolaan hutan dalam menyelamatkan dan menjaga hutan (di luar kawasan hutan) beserta jasa ekosistem dan keanekaragamannya yang bernilai tinggi, pada suatu kesatuan landskap dari dataran rendah sampai pegunungan di pulau Kalimantan. Manfaat proyek ini diharapkan dapat mengembangkan pengelolaan hutan di luar kawasan hutan, termasuk pengelolaan dan perlindungan hutan dalam perkebunan untuk mendukung secara global pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan yang memperhatikan konservasi keanekaragaman hayati serta mitigasi perubahan iklim.



Tujuan

Policy Brief ini merupakan dokumen hasil analisis terhadap isu strategis dan kebijakan yang dikembangkan dari hasil temuan di lapangan melalui kegiatan assessment, pendampingan, pelatihan, lokakarya/FGD/ diskusi-diskusi yang dilakukan ASPPUK selama menjalankan proyek. Tujuan dari pembuatan Policy Brief ini adalah:

1. Untuk mendukung pembuatan kebijakan (pembuatan keputusan) berdasar informasi yang relevan (informed evidence-based) kepada para stakeholder yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan/ membuat keputusan
2. Memberikan acuan dan pemahaman yang sama kepada pemerintah desa/kelurahan dan para pemangku kepentingan lainnya terhadap isu-isu strategis yang ada
3. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan para Pemangku Kebijakan terkait isu-isu yang berkembang di Kelurahan Kotawaringin Hilir

Asppuk dalam mendukung ASPPUK dalam Mendukung Pemberdayaan Local Champion di area sekitar hutan

Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK) merupakan organisasi jaringan di tingkat nasional yang memiliki 44 NGO anggota, berada di 20 provinsi, memiliki 77 Jaringan Perempuan Usaha Kecil Mikro (JARPUK) yang berada di level kota/kabupaten, memiliki 1528 Kelompok Perempuan Usaha Kecil Mikro (KPUK) ditingkat desa, mendampingi kurang lebih 2 juta perempuan usaha kecil mikro dan memiliki 33 Lembaga Keuangan Perempuan (LKP). ASPPUK memiliki visi terwujudnya perempuan usaha kecil mikro yang kuat, mandiri, setara dan berkeadilan gender serta inklusi.

ASPPUK sebagai organisasi yang focus pada pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, memiliki keahlian, pengalaman dan modalitas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan bisnis usaha melalui pendekatan;

(1) Pengintegrasian nilai-nilai 3 P (people, planet, profit) dalam pengembangan bisnis, dimana pengembangan model bisnis yang dikembangkan tidak saja mengejar keuntungan (profit) semata namun juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan (Planet) dan menghormati hak asasi manusia (people), dimana bisnis yang dijalankan harus dapat memenuhi hak-hak pekerja dan tidak melanggar HAM

(2) Pengintegrasian bisnis responsive gender, dimana bisnis yang dijalankan harus memperhatikan nilai-nilai kesetaraan gender dalam rantai nilai usaha, mengembangkan kebijakan bisnis yang ramah perempuan dan anak, mengembangkan SOP anti kekerasan seksual ketika menjalankan bisnis, memberlakukan pembagian peran adil gender, memberdayakan kaum perempuan yang hidup disekitar area usaha atau bisnis yang dijalankan dan lain-lain

(3) Pendekatan bisnis komunitas atau bisnis berbasis sumber daya local, dimana pendekatan ini dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang ada komunitas Bahan baku produk yang dikembangkan diambil dari keunggulan dan ciri khas yang ada di daerah tersebut, tidak mendatangkan bahan baku dari luar, namun memanfaatkan sumber daya local secara berkelanjutan, arif dan bijaksana.

ASPPUK telah memberdayakan Local Champion dan masyarakat khususnya perempuan dan kaum muda di lokasi sasaran proyek melalui serangkaian kegiatan seperti melakukan assessment awal di setiap desa/kelurahan lokasi sasaran proyek, melakukan ToT Kepemimpinan Sosial Ekonomi Perempuan yang kemudian dilanjutkan dengan Pelatihan Kepemimpinan Sosial Ekonomi di tingkat desa, melakukan pendampingan yang terdiri dari bisnis mentoring dan coachong, diskusi rutin, pelatihan pemasaran, pelatihan teknologi tepat guna berbasis sumber daya alam, bantuan bibit usaha, pendampingan untuk pengurusan NIB, HAKI, PIRT dan membangun kolaborasi dengan para stake holder.

Pengembangan Bisnis/ Usaha Komunitas di Kelurahan Kotawaringin Hilir

Selama pendampingan (Technical Assistance), ASPPUK melakukan mentoring dan coaching bisnis dengan mengembangkan bisnis/usaha komunitas untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan dari penduduk di komunitas pedesaan/pedalaman (termasuk masyarakat/suku asli) dengan cara meningkatkan pendapatan dan kemampuan komunitas melalui proses produksi dan pemasaran yang adil dari produk-produk unggulan desa/tempat mereka sesuai dengan potensi sumberdaya yang ada diwilayahnya.

Pengembangan usaha komunitas ini berdasarkan atas sumberdaya / Potensi yang ada di wilayah setempat, yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diolah menjadi mata pencaharian alternatif maupun eksisting untuk masyarakat desa. Sumberdaya yang dimaksud bukan hanya atas kekayaan alam namun sumberdaya manusia pun menjadi perhitungan utama sebagai pengelola yang bijak untuk mengelola sumberdaya / potensi yang ada tersebut.

Produk yang didorong sebagai unggulan atau identitas dari Local Champion dalam menjalankan dan mengembangkan Usaha Komunitas berdasarkan mapping dan perengkingan sumberdaya / potensi local yang ada di desa/kelurahan lokasi sasaran proyek, dimana produk unggulan dari Kelurahan Kotawaringin Hilir adalah Abon Ikan Aruan / ikan Gabus dari Sungai mengalir Kotawaringin Lama dan Gula Aren.

Usaha Komunitas yang dikembangkan oleh penerima manfaat program memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan-persoalan social ekonomi serta lingkungan, oleh karena itu keuntungan yang diperoleh dari usaha komunitas di Kelurahan Kotawaringin Hilir yang dibangun oleh tim Local Champion berkomitmen menyumbangkan 5% dari keuntungan yang dimiliki untuk berkontribusi terhadap persoalan sampah yang ada di Kelurahan Kotawaringin Hilir dan berkomitmen mendukung program/kegiatan untuk membangun dan melestarikan wilayah hutan APL

Mengapa ini penting?

Masih terjadi kesenjangan gender terhadap perempuan dan anak muda yang hidup di area sekitar hutan, diantaranya minimnya keterlibatan perempuan dan anak muda dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber-sumber ekonomi yang ada di desa, terbatasnya akses dan control perempuan dan anak muda terhadap pengelolaan sumber daya alam dan sumber-sumber ekonomi, minimnya kapasitas dan keterampilan perempuan dan anak muda dalam pengelolaan dan pengembangan bisnis usaha, kepemimpinan yang lemah, minimnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa sehingga perempuan dan anak muda tidak mampu menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya, masih adanya hambatan-hambatan social budaya yang menyulitkan perempuan maupun anak muda untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan di tingkat desa.

Gender menjadi masalah apabila terjadi perbedaan (diskriminasi) perlakuan dalam akses, partisipasi, kontrol dalam menikmati hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal gender menyebabkan ketidakadilan gender yang mayoritas menimpa kaum perempuan. Salah satu ketidakadilan gender ini termanifestasi dalam bentuk marginalisasi. Marginalisasi yaitu proses peminggiran atau pemiskinan perempuan yang mengakibatkan kemiskinan.

Kesenjangan Gender akan berkontribusi pada meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, memperburuk ketimpangan pembangunan, menghambat terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan menghambat pencapaian tujuan SDGs, yaitu tujuan ke 1; Mengakhiri kemiskinan, tujuan ke 5; Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan dan tujuan ke 8; Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua.

Perempuan dan anak perempuan serta kelompok rentan lainnya menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi. Prinsip SDGs “no one left behind” menunjuk pada kewajiban negara untuk memastikan bahwa tak ada satupun warganya yang tertinggal, terlupakan atau terpinggirkan dalam pembangunan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau lebih dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai komitmen global pembangunan yang disepakati seluruh anggota PBB . Indonesia, sebagai salah satu negara anggota PBB memiliki komitmen kuat dalam pelaksanaan SDGs yang diturunkan dalam 17 Tujuan serta 169 Target. Yang merupakan salah satu keunggulan Indonesia dalam menterjemahkan komitmen ini adalah dengan integrasi yang erat dengan program Nawa Cita pemerintah hingga tertuang secara konkrit dalam Rencana Kerja Pemerintah. Diterbitkannya Peraturan Presiden no. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi wujud komitmen tersebut.

Isu-Isu Gender dan Kepemimpinan Perempuan untuk mendukung Pencapaian SDGs

Kurangnya akses, kontrol terhadap pengelolaan sumber daya alam dan sumber-sumber ekonomi di desa

Perempuan belum memiliki akses dan kontrol yang kuat terhadap ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi di desanya masing-masing. Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan sumberdaya ekonomi sangat rendah. Hanya sebagian kecil saja perempuan yang memiliki akses yang kuat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sumberdaya alam dan sumber-sumber ekonomi besar dan berkelanjutan yang terdapat didalam desa merupakan wilayah kelola Laki-Laki, seperti hutan, sungai dan lahan pertanian. Laki-laki menjangkau lebih luas dan lebih jauh di dalam hutan untuk memanfaatkannya. Laki-laki sebagai pengelola utama, memiliki hak memanfaatkan dan mengeksplorasi hutan dan sungai dan perempuan sebagai pihak yang melakukan kelola lanjutan pasca panen.

Sepanjang Sungai kelurahan Kotawaringin Hilir belum termanfaatkan. Karamba jenis ikan gabus masih sangat terbatas. Industri rumahan pengolahan kerupuk ikan, juga masih sangat tradisional dan terbatas dalam pemasarannya. Pengolahan abon ikan, bakso gabus serta kapsul gabus, belum terpikirkan.

Minimnya Pelatihan-Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi perempuan

Beberapa kelompok perempuan di Kelurahan Kotawaringin Hilir pernah mengikuti pelatihan teknis usaha yang diberikan oleh dinas terkait, seperti dinas perikanan dan dinas kehutanan. Pelatihan tersebut seperti pelatihan budidaya madu kelulut, pelatihan pengolahan kerupuk berbahan ikan, pelatihan pengolahan gula aren, pelatihan pengolahan kue tradisional dan praktek budidaya hidroponik untuk kelompok wanita tani, sedangkan pelatihan khusus mengenai peningkatan manajemen usaha, manajemen keuangan, pemasaran online, teknologi tepat guna, pelatihan gender, belum pernah diberikan.

Lemahnya Jaringan Pasar

Jaringan pasar sangat berpengaruh terhadap peningkatan hasil produksi kerupuk. Sayangnya, perempuan pelaku usaha pengolahan ikan, masih kurang paham dan belum mengetahui jalur pemasaran dengan cukup baik. Mereka cukup paham tentang jalur pasar untuk ikan segar saja. Ikan segar dikonsumsi oleh masyarakat kelurahan dan tetangga kampung sekitarnya. Masalah yang sering dihadapi dalam pengolahan ikan adalah ketika musim kemarau hasil tangkapan nelayan melimpah, ikan segar tidak mampu diolah dalam bentuk produk turunan

Lemahnya kapasitas perempuan dalam manajemen keuangan dan pencatatan keuangan

Komunitas masyarakat pelaku usaha skala mikro dan super mikro, rata-rata belum melakukan pencatatan keuangan sederhana bahkan yang paling sederhana sekalipun. Keuangan usaha masih bercampur baur dengan keuangan rumah tangga. Belum ada pemisahan. Hal ini disebabkan karena, pelaku usaha mikro apalagi super mikro, menjalankan usahanya hanya untuk memenuhi kebutuhan makan. Agar dapur tetap berasap. Uang rumah tangga (bukan tabungan) yang sangat kecil digunakan sebagai modal usaha. Uang yang masuk dari penjualan, biasanya dipakai lagi untuk membeli kebutuhan makan keluarga, begitu seterusnya. Prioritas adalah biaya makan rumah tangga. Usaha mereka masih bersifat subsisten.

Norma-norma sosial gender yang tidak adil

Norma-norma sosial gender yang mengakar kuat dimasyarakat menempatkan perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus dan bertanggungjawab terhadap keluarga. Hal ini berdampak pada kurang aktifnya perempuan pada kegiatan-kegiatan masyarakat, mereka cenderung pasif dan menunggu datangnya bantuan, kurang inisiatif dan sulit digerakkan. Akhirnya mereka kurang terlibat dalam rapat-rapat desa, musrenbang, memiliki keterbatasan terhadap akses informasi, pelatihan-pelatihan, bantuan program dan modal usaha.

Area kunci yang seharusnya dilakukan pemerintah Kelurahan Kotawaringin Hilir diantaranya;

- Meningkatkan partisipasi perempuan pada seluruh aktivitas pertanian dan perikanan serta perhutanan dan memberikan ruang kontrol terhadap pengelolaan dan pemanfaatannya
- Mengintegrasikan isu GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas dan inklusivitas) dalam mendukung Pembangunan Desa utamanya di wilayah-wilayah APL, diantaranya dalam membuat Grand Design program-program pemerintah ataupun swasta lainnya agar lebih memperhatikan nilai-nilai Gender, Disabilitas dan Inklusi
- Memberi ruang kepada seluruh element masyarakat baik Pemangku kepentingan, Perempuan, Anak Muda, Disabilitas dalam pembangunan / pengembangan sebuah Kawasan
- Mengalokasikan anggaran, kegiatan dan program bagi pemberdayaan dan penguatan Kepemimpinan Local Champion sebagai Agen / Kader Perubahan Pembangunan Sosial-Ekonomi yang berperspektif Gender dan Berkelanjutan di wilayah APL
- Dibutuhkan peningkatan kapasitas untuk pengelolaan usaha komunitas khususnya yang dilakukan kaum perempuan, berupa; pertama pelatihan penyadaran keadilan dan kesetaraan gender bagi perempuan desa sebagai calon local champion. Kedua, pelatihan pengembangan usaha yang meliputi; manajemen usaha seperti pemasaran, packaging, rantai nilai produksi, dan pembukuan. Ketiga, pelatihan teknis usaha sesuai kebutuhan dan ketersediaan bahan baku lokal
- Mendorong kemajuan Usaha Komunitas yang telah di rintis oleh Local Champion
- Inisiasi pembentukan dan pendampingan lembaga keuangan mikro tingkat desa, kelompok tabungan atau pra koperasi. Lembaga ini bukan hanya berfungsi untuk menyediakan modal kerja alternatif bank, namun juga berfungsi mengatasi masalah keuangan rumah tangga khususnya dalam memenuhi biaya pendidikan dan kesehatan ibu dan anak
- Memfasilitasi terbukanya jaringan pemasaran yang luas bagi perempuan pelaku usaha kecil mikro untuk menjamin keberlanjutan usaha dari matapencaharian alternatif karena selama ini produk-produk industri rumahan memiliki keterbatasan jangkauan konsumen dan wilayah pemasaran
- Mendorong terciptanya mata pencaharian alternatif untuk membantu memulihkan kondisi sumber daya alam dan mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari hutan(kayu). Penciptaan sumber pendapatan. Studi yang dilakukan ASPPUK diberbagai daerah dampingan perempuan pelaku usaha kecil dan mikro di Indonesia menunjukkan bahwa rumah tangga akan menghadapi kesulitan-kesulitan kehidupan jika hanya bertumpu pada aktivitas dari hutan dan perikanan saja, karena sumberdaya terus mengalami penipisan. Untuk bisa bertahan dan meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga, dibutuhkan inovasi dalam mengembangkan strategi-strategi ekonomi yang beragam di luar sektor hutan dan perikanan.

